

# Dampak Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dan Perubahan Sosial Terhadap Perkembangan Pendidikan Anak Tahanan G30S di Pulau Buru 1969-1976

**Rimadany Yuda Chusata**

Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

## Info Artikel

### Riwayat Artikel:

Diterima 10, 02, 2024  
Disetujui 11, 02, 2024  
Diterbitkan 13, 02, 2024

### Katakunci:

*The New Order;*  
*G30S;*  
*Buru Island;*  
*Government Policy;*  
*Social Transformation*

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the impact of New Order government policies on the educational development of children of G30S prisoners on Buru Island in the 1969-1976 period. During that time, the New Order government in Indonesia implemented various policies that influenced various aspects of life, including the education of children of G30S prisoners on Buru Island. This research reviews these policies and tries to identify their impact on children's education.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Penulis Korespondensi:

**Rimadany Yuda Chusata**

Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia  
Email: [rimamandalawangi@gmail.com](mailto:rimamandalawangi@gmail.com)

### Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Chusata, R. Y. (2024). Dampak Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dan Perubahan Sosial Terhadap Perkembangan Pendidikan Anak Tahanan G30S di Pulau Buru 1969-1976. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 2(1), 148~154. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2248>

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Selama periode 1969-1976, kebijakan pemerintah Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan konsolidasi kekuasaan. Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan, di mana perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan akses, dan pembagian tingkatan pendidikan menjadi fokus utama. Dampak kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap perkembangan pendidikan anak tahanan G30S di Pulau Buru secara khusus dapat dikaji dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu, termasuk pengaruh terhadap kurikulum, akses pendidikan, dan kondisi sosial anak-anak tahanan.

Ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan, pemerintahannya mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menekan perlawanan politik, termasuk terhadap kelompok-kelompok yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S. Salah satu konsekuensinya adalah penahanan dan deportasi terhadap sejumlah individu yang dianggap terlibat atau diidentifikasi sebagai simpatisan PKI. Pemerintahan Orde Baru Suharto ditandai oleh pembangunan ekonomi dan sosial yang mengesankan, tetapi juga oleh korupsi dan penindasan [1]. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta melakukan pelaksanaan pemilihan umum secara teratur untuk menjaga kedaulatan rakyat. Meskipun berhasil dalam pembangunan ekonomi, pemerintahan Orde Baru juga diwarnai oleh kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pulau Buru, yang terletak di Provinsi Maluku, digunakan sebagai tempat pengasingan bagi tahanan politik yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Selama kurun waktu 1969-1976, para tahanan di Pulau Buru menghadapi berbagai dampak akibat kebijakan pemerintah Orde Baru. Mereka diasingkan ke pulau ini dan menghadapi kondisi yang sulit, termasuk dalam hal pendidikan anak-anak tahanan G30S. Beberapa tahanan berhasil bertahan, sementara yang lain meninggal di pulau tersebut. Hingga kini, para mantan tahanan Pulau Buru terus menulis memoar tentang pengalaman mereka [2].

Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan anak tahanan G30S di Pulau Buru mencakup pembatasan akses terhadap pendidikan formal, kurikulum yang dikendalikan penuh oleh pemerintah, serta kondisi penahanan yang mungkin tidak mendukung proses pendidikan yang optimal. Pembatasan tersebut bisa mencakup akses terhadap buku-buku, guru yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Pemerintah Orde Baru menganggap bahwa pemberontakan G30S/PKI sebagai suatu ancaman serius terhadap Pancasila. Pemberontakan PKI di bawah pimpinan Aidit tersebut dinilai bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Sebagian besar dari mantan tahanan politik harus rela menderita karena secara ekonomi harus hidup apa adanya karena hak-hak ekonomi mereka dibatasi sedemikian rupa. Demikian juga dengan kehidupan sosial para mantan tahanan politik. Rata-rata mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari lingkungan mereka. Hal ini disebabkan karena stigma yang dilabelkan oleh penguasa bahwa mantan tahanan politik G30S/PKI merupakan orang yang berbahaya dan tidak bisa dipercaya [3].

Sementara itu, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar juga dapat memengaruhi pendidikan anak tahanan. Stigma sosial terhadap kelompok yang terlibat dalam G30S/PKI mungkin menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pengembangan diri anak-anak tersebut. Selain itu, isolasi pulau dan kurangnya integrasi dengan masyarakat luas dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan psikologis anak-anak tersebut. Perubahan sosial dan lingkungan yang tidak mendukung dapat memengaruhi pendidikan anak tahanan, terutama terkait dengan stigma sosial dan isolasi. Anak-anak tahanan rentan mengalami stigmatisasi dan kurangnya integrasi dengan masyarakat luas, yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial, psikologis, dan pendidikan mereka. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tahanan seringkali tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak anak secara memadai, termasuk dalam hal pendidikan, perlindungan, dan Kesehatan [4]. Selain itu, lingkungan tahanan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak, termasuk kesadaran hukum, kualifikasi pendidik, dan integrasi dengan Masyarakat. Meskipun demikian, beberapa lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia berupaya memberikan perlakuan yang layak dan pendidikan yang menjamin masa depan anak-anak tahanan.

Melalui penelitian lebih lanjut, dapat dipahami lebih dalam bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru dan perubahan sosial di Pulau Buru pada periode tersebut berdampak pada pendidikan anak tahanan G30S. Ini menjadi bagian penting dalam memahami perjalanan sejarah Indonesia dan implikasinya terhadap perkembangan sosial dan pendidikan.

## 2. DASAR TEORI

### Sejarah Politik Indonesia pada Era Orde Baru

Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah transisi dari pemerintahan Soekarno pada tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1998 setelah jatuhnya Soeharto. Tujuan utama Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia setelah periode krisis yang melanda. Pemerintahan Orde Baru mengimplementasikan kebijakan politik dan keamanan yang keras, termasuk penganiayaan terhadap kelompok-kelompok terkait G30S/PKI. PKI dilarang dan beberapa pemimpinnya diasingkan atau dieksekusi. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 [5].

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dikenal dengan kebijakan politik otoriter dan penekanan terhadap oposisi politik. Selama masa ini, terjadi penghilangan paksa, penahanan, dan eksekusi terhadap anggota dan simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia) pasca peristiwa G30S/PKI pada 1965. Kebijakan politik dan keamanan Orde Baru juga melibatkan pembungkaman terhadap kritikus rezim, sensor terhadap media, serta pengawasan ketat terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM yang meluas dan otoritarianisme yang meresahkan. Meskipun pemerintahan Orde Baru juga dianggap berhasil dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, namun penindasan politik dan keamanan yang dilakukannya menuai kritik dari dalam dan luar negeri [6].

### Teori Pendidikan dalam Konteks Penahanan

Dalam konteks penahanan, pendidikan dan pengajaran bagi tahanan memiliki peran penting dalam membantu perkembangan anak-anak yang berada dalam situasi tersebut. Program pendidikan yang sesuai dan mendukung, serta akses terhadap bahan bacaan dan kegiatan kreatif, dapat membantu anak-anak menjaga keseimbangan emosional dan perkembangan intelektual mereka selama berada di dalam penahanan. Upaya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di dalam penahanan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan agar mereka memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang [7]. Terdapat beberapa teori pendidikan alternatif atau non-formal yang dapat diterapkan dalam konteks penahanan. Beberapa di antaranya termasuk pendidikan non-formal, *homeschooling*, dan sistem pendidikan non-formal di desa. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang dilakukan di luar lingkup pendidikan formal, memberikan fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan kurikulum, serta dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal [8]. *Homeschooling*, atau pendidikan di rumah, juga merupakan bentuk pendidikan alternatif yang semakin diminati oleh Masyarakat [9]. Selain itu, sistem pendidikan non-formal di desa menawarkan fasilitas terjangkau, fleksibilitas waktu, pengetahuan praktis, peningkatan keterampilan, dan meningkatkan kemandirian warga desa, sehingga menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Dengan demikian, penerapan teori-teori ini dapat membantu memperluas akses pendidikan dalam konteks penahanan.

### Sosiologi Pendidikan dan Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada individu dan keluarga mereka di Indonesia. Stigmatisasi dimulai pada tahun 1965 setelah upaya kudeta yang gagal yang disalahkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan berlanjut selama beberapa dekade. Hal ini telah menyebabkan pengucilan dari masyarakat, pengangguran, dan pelecehan terhadap keturunan mereka yang terkait dengan PKI. Penolakan pemerintah untuk meminta maaf dan kebutuhan rekonsiliasi nasional dan perbaikan sejarah telah ditekankan. Stigma ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan integrasi sosial [10]. Dalam bidang sosiologi pendidikan, dampak stigma sosial terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI

merupakan area studi yang signifikan. Konsekuensi jangka panjang dari stigma ini pada individu yang terkena dampak, keluarga mereka, dan masyarakat pada umumnya merupakan fenomena sosiologis yang kompleks yang memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut. Literatur yang ada dan kesaksian langsung menekankan sifat yang meresap dan abadi dari stigma ini, menjadikannya subjek penelitian sosiologis yang menarik [11].

Stigma sosial dapat memengaruhi pendidikan anak-anak dan interaksi sosial mereka. Sebuah studi tentang dukungan sosial dan strategi menghadapi stigma negatif anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan menunjukkan bahwa dukungan sosial dan strategi yang tepat dapat membantu anak-anak mengatasi stigma negatif dan meningkatkan interaksi sosial mereka [12]. Stigma negatif dari masyarakat juga dapat membuat orang dengan gangguan kesehatan jiwa sulit pulih dan mengurangi interaksi sosial mereka

### **Psikologi Anak dan Dampak Trauma**

Studi psikologi anak terkait dengan pengalaman traumatis menunjukkan bahwa trauma masa kanak-kanak dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan emosional anak. Dampak psikologis trauma pada anak-anak dapat meliputi self-harm, perilaku agresif, kecemasan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, masalah dalam berelasi dengan keluarga, gangguan tidur, perubahan emosi, dan perilaku. Beberapa teori psikologi anak menekankan bahwa pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesejahteraan emosional anak hingga masa remaja dan dewasa. Gejala trauma pada anak dapat berubah menjadi gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang memerlukan penanganan yang tepat. Anak yang mengalami trauma perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat agar perkembangan mereka tidak terhambat dan kehidupan sosialnya tidak terganggu.

### **Sosiologi Pulau Buru dan Isolasi Sosial**

Isolasi sosial dapat berdampak pada kemampuan anak-anak tahanan untuk mengembangkan keterampilan sosial, belajar norma sosial, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Menurut penelitian, isolasi sosial pada anak-anak tahanan dapat menyebabkan keterbatasan dalam interaksi dengan masyarakat luas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan sosial dan keterampilan interpersonal mereka. Dampak ini dapat mempersulit reintegrasi anak-anak tahanan ke dalam masyarakat setelah masa tahanan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan yang tepat untuk mengatasi isolasi sosial dan memfasilitasi perkembangan keterampilan sosial anak-anak tahanan. Anak-anak tahanan mungkin mengalami stigmatisasi atau diskriminasi dari masyarakat luas sebagai akibat dari hubungan keluarga mereka dengan tahanan G30S/PKI. Stigma ini dapat menghambat integrasi sosial anak-anak, membatasi dukungan dari lingkungan sekitar, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka. Dampak dari peristiwa G30S/PKI, termasuk stigma terhadap komunisme, telah berdampak jangka panjang terhadap masyarakat Indonesia, menciptakan sentimen kebencian, trauma, dan perubahan politik. Stigmatisasi buruk terhadap PKI dan komunisme yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru juga telah memengaruhi nasib korban, termasuk anak-anak, yang masih dirasakan hingga saat ini.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode dan metodologi yang digunakan adalah metode sejarah adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode dalam penelitian sejarah adalah bagaimana memperoleh pengetahuan, sedangkan metodologi adalah mengetahui bagaimana mengetahui. Ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu mencari topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Tahap-tahap dalam langkah-langkah penelitian sejarah meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi [13].

#### 4. HASIL DAN DISKUSI

##### **Kebijakan Pemerintahan Orde Baru mengenai penyelesaian tahanan politik G30S 1965**

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru mengenai penyelesaian tahanan politik G30S 1965 didasarkan pada upaya pembubaran dan penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta tindakan balas dendam terhadap para anggota PKI dan simpatisannya. Setelah Soeharto berkuasa, dia melarang secara resmi organisasi yang berkaitan dengan PKI pada 12 Maret 1965. Selain itu, berbagai teori juga menunjukkan keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S 1965, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Orde Baru untuk melakukan pembubaran PKI dan penindasan terhadap anggotanya. Selama masa transisi ke Orde Baru, terjadi perubahan peta politik dan ekonomi di Indonesia pasca peristiwa G30S 1965, yang berdampak pada berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru [14].

##### **Perubahan sosial yang terjadi setelah peristiwa G30S 1965**

Perubahan sosial yang terjadi setelah peristiwa G30S 1965 di Indonesia termasuk munculnya demonstrasi menentang PKI, pembunuhan dan penangkapan terhadap anggota PKI, serta krisis politik dan ekonomi. Secara politik, terjadi perubahan peta kekuatan politik dengan lahirnya kekuatan politik baru, yaitu tentara AD, sementara PKI hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno meredup, dan terjadi pembantaian terhadap jutaan manusia dengan alasan membasmi komunisme. Selain itu, terjadi krisis politik dan ekonomi yang mendalam. Dampak sosial dan politik lainnya meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap anggota PKI, serta munculnya pertentangan dalam lembaga dan aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran. Dari dibuatnya kebijaksanaan itu, tidak semua permasalahan dapat teratasi, melainkan banyak perubahan sosial yang muncul. Diantaranya permasalahan keluarga yang terpisah, masalah pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani para tahanan dan keluarganya, dan masih banyak lagi permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah masalah pendidikan. Ketika suatu kebijaksanaan telah dibuat, maka ada keputusan lain yang akan dibuat guna memberi kelanjutan dari permasalahan-permasalahan yang berkembang. Dengan sebuah kebijaksanaan yang dibuat pemerintah mengatur tentang penyatuan kembali tahanan dengan keluarga. Permasalahannya adalah apakah tempat pemanfaatan tahanan cukup layak ditinggali oleh anak-anak dan keluarga para tahanan. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi banyak pihak yang terlibat, keadaan yang dirasa cukup memadai di Pulau Buru membuat pengiriman anak-anak dan keluarga para tahanan dipersatukan sejak tahun 1972. Selanjutnya setelah mereka dipersatukan, bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, melainkan muncul permasalahan lain yang perlu dipikirkan penyelesaian selanjutnya. Maka dibuat lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang mempunyai pengaruh besar perkembangan selanjutnya. Termasuk perkembangan Pendidikan.

##### **Dampak kebijakan pemerintahan Orde Baru dan perubahan sosial terhadap perkembangan pendidikan anak tahanan politik G30S di Pulau Buru 1969-1976**

Kebijakan pemerintahan Orde Baru dan perubahan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan anak tahanan politik G30S di Pulau Buru antara tahun 1969 hingga 1976. Proses penahanan dan pengasingan para tahanan politik tersebut memengaruhi pendidikan anak-anak mereka. Pemulangan para tahanan politik ke keluarga dan kampung halaman mereka dipengaruhi oleh alasan kemanusiaan dan ketiadaan undang-undang yang menuntut penahanan mereka secara terus-menerus. Kebijakan pemerintahan Orde Baru, termasuk penahanan tahanan politik, berdampak besar pada struktur sosial pada saat itu, yang pada gilirannya memengaruhi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak para tahanan politik [15]. Anak-anak tahanan politik di Pulau Buru mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang akses pendidikan anak-anak tahanan politik, situasi politik yang membatasi akses terhadap pendidikan formal di Pulau Buru telah menjadi perhatian. Sebuah studi menunjukkan bahwa kearifan lokal di Pulau Buru dianggap penting untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan, namun, hal ini tidak menyingkirkan pentingnya akses pendidikan formal. Faktor-faktor seperti kondisi hidup yang sulit dan situasi keamanan yang ketat di Pulau Buru mungkin mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan anak-anak tahanan politik, sehingga dapat memengaruhi proses pembelajaran mereka.

Kebijakan Orde Baru cenderung membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Anak-anak tahanan politik mungkin tumbuh dalam lingkungan di mana ekspresi kritis terhadap pemerintah atau ideologi resmi dihambat. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers terbatas dan dikendalikan oleh pemerintah. Departemen Penerangan dan SIUPP merupakan faktor yang menjadi penghambat kebebasan pers pada masa Orde Baru. Perusahaan pers dituntut untuk memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah Orde Baru, sehingga pers tidak dapat menjalankan fungsinya yang sesungguhnya, yaitu mengawasi kinerja pemerintah dan menyalurkan aspirasi Masyarakat [16]. Namun, setelah runtuhnya kekuasaan pemerintah Orde Baru, kehidupan pers di Indonesia mulai memperoleh kebebasan, terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 yang mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan. Dalam undang-undang yang baru ini, secara tegas dinyatakan tentang dijaminnya kebebasan pers dan tidak adanya penyensoran, pembredelan, dan lainnya [17]. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah era Orde Baru.

Interaksi anak-anak tahanan politik dengan masyarakat setempat di Pulau Buru dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat setempat mungkin memberikan dukungan atau memandang negatif terhadap mereka, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan psikologis mereka. Setelah masa tahanan berakhir, anak-anak ini kemungkinan akan menghadapi tantangan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pengalaman di Pulau Buru dapat memengaruhi perkembangan pribadi, pendidikan, dan karir mereka dalam jangka panjang. Proses reintegrasi ke masyarakat dapat menjadi tantangan, terutama setelah pengalaman seperti itu. Beberapa penelitian mengeksplorasi proses reintegrasi mantan narapidana tindak terorisme dan orang dengan skizofrenia ke dalam masyarakat, yang dapat memberikan wawasan tentang hambatan dan strategi untuk reintegrasi. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam membagi pengalaman dan membangun ketahanan masyarakat untuk mencegah ekstrimisme kekerasan, yang dapat menjadi landasan untuk memahami tantangan reintegrasi anak-anak tersebut [18].

## KESIMPULAN

Pemerintahan membuat kebijaksanaan karena didasari adanya permasalahan yang mempunyai pengaruh kepada banyak orang, dan kebijaksanaan yang dibuat memiliki makna bagi penyelesaian permasalahan yang perlu diatasi dengan cara-cara khusus sehingga dalam proses penyelesaiannya mengarah pada tujuan-tujuan yang diharapkan bersama. Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru untuk mengatasi penyelesaian tahanan G30S adalah kebijaksanaan yang dibuat dan dipikirkan bersama untuk kebaikan banyak pihak. Mengenai adil atau tidaknya kebijaksanaan itu untuk tahanan G30S. Kebijaksanaan itu adalah pemindahan tahanan politik dari rumah tahanan yang sudah tidak bisa menampung tahanan G30S ke tempat pemanfaatan. Tujuan pemindahan itu adalah untuk membina para tahanan untuk bisa kembali lagi nantinya ke masyarakat umum. Caranya dengan memberikan pembinaan keagamaan dan pembinaan fisik. Di tempat pemanfaatan ini para tahanan mempersiapkan tempat yang mulanya berupa hutan menjadi lahan yang siap untuk lahan. Dampak kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dan perubahan social terhadap perkembangan pendidikan anak tahanan G30S di Pulau Buru diantaranya, Kebijaksanaan pemerintah Orde Baru terhadap penyelesaian tahanan G30S adalah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari peristiwa G30S. Pulau Buru dipilih sebagai tempat rehabilitasi tahanan G30S/PKI golongan B karena letaknya yang jauh dari ibu kota yang sedang dalam keadaan sensitif, sebagai proyek transmigrasi, dan punya sejarah sebagai tempat pengungsian. Di Pulau Buru pemerintah mengadakan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak dan keluarga tahanan G30S.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] I. Investments, “Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter.” 2020.
- [2] Iqbak Muhtarom, “Kisah Pulau Buru Tempat Pengasingan Para Tahanan Politik G30S,” <https://nasional.tempo.co/read/1515780/kisah-pulau-buru-tempat-pengasingan-para-tahanan-politik-g30s>.
- [3] H. Patra, A. Anatona, and Y. Narny, “Pengawasan Orde Baru Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI Di Sumatera Barat,” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, vol. 11, no. 1, pp. 54–70, 2022.
- [4] N. R. Irmayani, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada Di Rumah Tahanan: Studi Kasus Di Rutan Kelas Iiib Sambas Kalimantan Barat Indonesia,” *Asian Social Work Journal*, vol. 3, 2018.
- [5] Rendi Mahendra, “Sejarah Masa Orde Baru dan Latar Belakang ,” <https://kabar24.bisnis.com/read/20231129/243/1719190/sejarah-masa-orde-baru-dan-latar-belakang>.
- [6] M. Ricklefs, “A History of modern Indonesia since c. 1200.” Palgrave Macmillan Ltd, 2008.
- [7] A. C. Alamanzo, “Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Tahanan Sebagai Bagian Program Perawatan Tahanan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).,” (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum)., 2014.
- [8] I. Husti, “Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam Desain Hadits Tarbawi,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 485–492, 2022.
- [9] M. Ismail, “HOMESCHOOLING: Sebuah Pendidikan Alternatif,” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, vol. 19, pp. 100–111, Jun. 2016, doi: 10.24252/lp.2016v19n1a9.
- [10] Asvi Warman Adam (The Jakarta Post), “Wiping out 1965 stigma ,” <http://bit.ly/tjp-android> iOS: <http://bit.ly/tjp-ios>.
- [11] H. T. Atmaja, “Collective Memory and State’s Stigmatization of Ex-Political Prisoners on G-30S in 1965,” *IHiS (Indonesian Historical Studies)*, vol. 3, no. 2, pp. 116–124, 2019.
- [12] R. Widhiati, E. Malihah, and S. Sardin, “Dukungan Sosial dan Strategi Menghadapi Stigma Negatif Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan,” *Jurnal Paedagogy*, vol. 9, p. 846, Oct. 2022, doi: 10.33394/jp.v9i4.5612.
- [13] W. J. Sukmana, “Metode penelitian sejarah,” *Seri Publikasi Pembelajaran*, vol. 1, no. 2, pp. 1–4, 2021.
- [14] Sunardi, “Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Gestok 1965,” <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/kebijakan-ekonomi-politik-indonesia-pasca-gestok-1965-2/>.
- [15] S. B. Husain, “‘MENJEMPUT KERINDUAN KELUARGA’ PENYELESAIAN DAN PENGEMBALIAN TAHANAN POLITIK PULAU BURU KE MASYARAKAT, 1965-1979,” *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, vol. 14, no. 2, 2019.
- [16] Cahya Dicky Pratama and Serafica Gischa, “Pers di Era Orde Baru ,” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/165353669/pers-di-era-orde-baru>.
- [17] D. N. Susilastuti, “Kebebasan pers pasca orde baru,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 4, no. 2, pp. 221–242, 2000.
- [18] F. A. Prasetyo and R. Mufanti, “THE REINTEGRATION PROCESS OF PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA WHO REPEATED RELAPSE RETURN INTO THE COMMUNITY,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 11, no. 1, pp. 9–16, 2022.